

DAMPAK DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG

Imal Istimal

STIE Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu,
Jakarta Selatan
Email: imalistimal@yahoo.com

Abstract

The objectives of the study are to: (1) analyze the correlation between DAU and poverty and (2) the effect of DAU to poverty in Kota Tangerang. The values examined in this study used regression and correlation method. The result of the study show that (1) DAU and poverty has negative correlation, is -0,248 which stated that between DAU and poverty has low correlation in di Kota Tangerang. (2) Estimation result by regression showed that the coefficient of DAU is negative to poverty by -3.9 percent. This value stated that every changes one unit of DAU (in rupiah) would reduce poverty by 3.9 percent.

Kata Kunci: desentralisasi, DAU, kemiskinan, Kota Tangerang

PENDAHULUAN

Kota Tangerang secara geografis sangat strategis karena merupakan penyangga utama Ibu Kota Negara DKI Jakarta dan kota paling depan di wilayah Banten. Letak geografis seperti itu sangat menguntungkan bagi daerah Kota Tangerang, terutama dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, kota Tangerang mengandalkan pada kegiatan sektor-sektor ekonomi strategis seperti industri, perdagangan, perumahan dan perbankan serta keuangan. Tumpahan aktivitas ekonomi dari metropolitan Jakarta selain merupakan modal penggerak ekonomi juga membawa dampak ikutan berupa permasalahan lingkungan, kesediaan lahan dan tingginya angka migrasi. Besarnya arus migrasi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia serta permasalahan lainnya menjadikan Kota Tangerang menghadapi permasalahan yang kompleks. Kompleksitas masalah tersebut antara lain terlihat dari tingginya angka kemiskinan, permukiman kumuh (*squatter*), lingkungan hidup (sampah) dan lain sebagainya.

Tangerang merupakan salah kota industri di Provinsi Banten. Dengan struktur kota tersebut, kontribusi perusahaan-perusahaan berskala besar di Kota Tangerang sangat besar terutama dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari PDRB Kota Tangerang yang pada tahun 2004 sebesar Rp 6.6 milyar dan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 5,467%. Sementara itu, kontribusi perusahaan-perusahaan skala besar, khususnya yang bergerak di sektor industri hampir 60%..

Walaupun kontribusi perusahaan-perusahaan besar terhadap peningkatan PDRB naik secara signifikan, ternyata angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tangerang tetap tinggi. Data menunjukkan, sampai dengan November 2008, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 84.443 (11,98%) dari total angkatan kerja, yaitu 705.021 jiwa. Angka pengangguran yang tinggi ini menjadi sumber utama kemiskinan dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Sementara, menurut Data Dinas

Kesehatan Kota Tangerang tahun 2008 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat pada periode tahun 2003-2005. Tahun 2005 jumlah masyarakat miskin mencapai 4,39% dari jumlah penduduk. Angka ini kemudian mengalami peningkatan, yakni 6,41% pada tahun 2006.

Sejalan dengan apa yang dihadapi oleh Kota Tangerang, khususnya masalah kemiskinan, para pakar pembangunan sependapat bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh (*comprehensive*) dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral dan kewilayahan serta partisipatif. Karena itu, pendekatan pembangunan partisipatif sebagaimana tercantum dalam UU. No. 25/2004 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan pentingnya perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Hal tersebut sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi.

Kerangka desentralisasi sebagaimana telah diatur dalam paket UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 33/2004 memiliki dua dimensi dasar, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi politik. Dari dimensi ekonomi, pelaksanaan desentralisasi merupakan momentum bagi bangkitnya demokrasi ekonomi. Momentum tersebut dapat dilihat dari tujuan otonomi daerah dalam mendorong kemandirian daerah.

UU. No. 33/2004 Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah menitikberatkan pada desentralisasi keuangan yang merupakan komponen inti dari konsep desentralisasi. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan (*expenditure*) secara mandiri. Desentralisasi keuangan dalam prakteknya terdiri dari beberapa bentuk, termasuk (a) pendanaan mandiri; (b) menjalin kerjasama pendanaan dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur; (c) ekspansi sumber pendapatan daerah melalui

berbagai retribusi; (d) dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan (e) utang luar negeri.

Peran kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi kemiskinan berkaitan dengan kewenangannya dalam hal fungsi alokasi belanja dan distribusi belanja. Hal yang terpenting dari kedua fungsi tersebut yaitu fungsi alokasi belanja publik. Hal ini disebabkan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan lain-lain.

Dalam kaitan itulah UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, terdapat komponen anggaran yang diperuntukkan sebagai dana perimbangan (*equalization transfer*) (Dana Alokasi Umum/DAU). Salah satu tujuan dari DAU ini adalah upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan penyediaan fasilitas pelayanan publik khususnya bidang pendidikan kepada masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis hubungan dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kota Tangerang.
2. Menganalisis dampak dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kota Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Desentralisasi

Dengan diterapkannya UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah setiap daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahannya, sehingga lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. dalam UU. No 32/2004

tentang Pemerintahan Daerah adalah “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”

2. Desentralisasi Fiskal

Terkait dengan keuangan daerah, dalam UU. No. 32/2004 disebutkan: “perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dokonsentrasi dan tugas pembantuan. Semangat otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal didasari juga oleh keinginan yang kuat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan nantinya pemerintah daerah akan lebih efektif dan mampu untuk memenuhi pelayanan publik yang dibutuhkan, pembangunan sarana dan perekonomian akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Pakasi, 2005).

Keseimbangan antara kebutuhan pendapatan dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan juga memiliki dimensi horizontal. Artinya, dengan transfer yang sama seharusnya juga menghasilkan penerimaan yang sama antardaerah. Sidik (2002) mengemukakan bahwa kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat bervariasi, tergantung kondisi daerah yang bersangkutan, seperti memiliki kekayaan alam atau tidak, intensitas kegiatan ekonomi yang

tinggi atau tidak, tingkat kemiskinan, penduduk lanjut usia dan lain sebagainya.

Studi Braun dan Grote dalam Rozi (2007) membuktikan bagaimana desentralisasi dengan berbagai bentuknya dapat menyebabkan penurunan pada kemiskinan. Studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi multivarian menemukan bahwa desentralisasi politik yang diukur/diproksi dari *election tiers*, desentralisasi administratif yang diukur dari *size of population*, desentralisasi fiskal yang diukur *share of subnational expenditure*, semuanya berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Namun mereka kembali menekankan pentingnya melihat ketiga bentuk desentralisasi tersebut secara bersama-sama (*simultaneously*) dan urutan (*sequencing*), yang mana yang memainkan peranan penting.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam Pasal 27, dinyatakan bahwa bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Yang dimaksud dengan Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah Penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagikan kepada Daerah.

4. Indikator Pembangunan

Menurut Todaro (2003) pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang

serba lebih baik. Karena itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu: *pertama*, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. *Kedua*, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. *Ketiga*, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Mengacu pada berbagai definisi pembangunan di atas, maka para ekonom merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan. Dudley Seer dalam Todaro (2003) merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan sebagai berikut: (a) tingkat ketimpangan pendapatan; (b) penurunan jumlah kemiskinan; dan (c) penurunan tingkat pengangguran. Ketiga ukuran keberhasilan di atas jika disimak lebih dalam adalah menuju satu sasaran akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti menurunnya kemiskinan (Amir, 2007)

5. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan menurut Sach dalam Amir (2007) ditandai atau tidak dimilikinya:

- a. *Human Capital* (kesehatan, pendidikan dan nutrisi yang baik);
- b. *Bussines Capital*;
- c. *Infrastructure* (jalan, listrik, air bersih, sanitasi, perlindungan lingkungan dan sarana publik lainnya);
- d. *Natural Capital*;
- e. *Public Institutional Capital* (administrasi publik yang dikelola dengan baik, sistem

pengadilan yang bersih dan polisi yang baik);

- a. *Knowledge Capital* (modal ilmu pengetahuan).

6. Hipotesis

H_0 : DAU berdampak negatif terhadap pengurangan kemiskinan di Kota Tangerang
 H_1 : DAU berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan di Kota Tangerang

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan DAU (dalam rupiah) dan tingkat kemiskinan (dalam persen) di Kota Tangerang. Sementara metode kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan dan menduga dampak DAU terhadap pengurangan kemiskinan di Kota Tangerang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data-data Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang.

Model korelasi dan regresi sederhana digunakan untuk mengetahui dampak dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kota Tangerang selama tahun yang diobservasi. Pendekatan yang dilakukan adalah *ordinary least square* dengan model: (Juanda, 2009): $Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon$ untuk $t = 1, 2, \dots, T$. Dalam penelitian ini, konstruksi model dirancang sebagai berikut:

$$Y_t = a - \beta X_t + \varepsilon$$

Persamaan menyatakan bahwa perubahan DAU berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang. Disebabkan terdapat perbedaan satuan data,

maka model di atas perlu ditransformasi ke dalam logaritma natural, sehingga model di atas menjadi:

$$\ln Y_t = a - \ln \beta X_t + \varepsilon$$

Dimana:

- Y_t = kemiskinan (dalam persen) (*headcount index*) pada tahun yang diobservasi
- α = konstanta dimana parameter DAU tidak berubah
- β = nilai dugaan variabel DAU
- X_t = variabel DAU

Untuk analisis korelasi digunakan korelasi sederhana sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

- x = Variabel kemiskinan (dalam persen)
- y = Variabel DAU (dalam rupiah)
- r = Koefisien Korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilustrasi grafis DAU Kota Tangerang dari tahun 2000-2011 sebagaimana tampak dalam gambar 1 pada bagian lampiran dalam artikel ini.

Dari data tersebut terlihat bahwa trend transfer DAU dari Pemerintah Pusat Ke Kota Tangerang terus meningkat. Dari Rp. 33 milyar pada tahun 2000 kemudian meningkat menjadi Rp. 146 milyar pada tahun 2001. Trend peningkatan ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2008. Namun demikian pada tahun 2009, DAU yang diterima Kota Tangerang menurun dengan nilai sebesar Rp. 496 milyar. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011, DAU Kota Tangerang kembali meningkat dengan masing-masing nilai sebesar Rp. 458 milyar dan Rp. 554 milyar.

Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Tangerang dari tahun 2000-2001 bergerak pada kisaran angka 4-5 persen. Tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan oleh Pemerintah Kota Tangerang terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 4,06 persen dari total penduduk. Namun demikian, terutama pada tahun 2005 angka kemiskinan kembali meningkat yang mencapai 6,41 persen dari total penduduk. Pergerakan angka kemiskinan di Kota Tangerang sebagaimana tampak dalam gambar 2 di bagian lampiran dalam artikel ini.

Secara teoritik, terdapat banyak pendekatan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di suatu wilayah. Setidaknya, terdapat dua pendekatan arus utama, yaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan *welfare economics*. Pendekatan neoklasik menekankan pentingnya investasi sebagai corong pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi, maka diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja dan pada gilirannya akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan otomatis terjadi pengurangan angka kemiskinan. Inilah yang kemudian disebut sebagai konsep *trickle down effect*. Pengurangan angka kemiskinan melalui pendekatan ini dinilai terlalu reduksionis, sehingga diperlukan pendekatan lain yang lebih komprehensif.

Di sisi yang lain, pendekatan *welfare economics* menekankan pentingnya peran pemerintah melalui kebijakan transfer antarberbagai tingkat pemerintahan. Titik tekan pendekatan ini menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat diserahkan pada pasar, tetapi diperlukan peran pemerintah di dalamnya.

Dalam konteks pendekatan inilah sesungguhnya konsep desentralisasi fiskal berada. Di Indonesia, desentralisasi fiskal ditandai oleh UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi fiskal ini ditunjukkan oleh kewenangan daerah dalam mengelola sendiri keuangan mereka. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah ini ditujukan agar upaya-upaya pembangunan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan di daerah dapat ditangani secara lebih cepat.

Salah satu bentuk desentralisasi fiskal tersebut ditunjukkan oleh adanya kebijakan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari tiga komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berfokus pada DAU, DAU diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk *block grant*. Ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan kepentingan dan prioritas daerah, termasuk kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. DAU bertujuan untuk mengurangi *fiscal gap* dan mengurangi ketimpangan daerah.

Hasil penelitian penulis di Kota Tangerang menunjukkan, DAU belum berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hasil tersebut ditunjukkan oleh elastisitas kemiskinan hanya 3,9% ketika terjadi perubahan (peningkatan/penurunan) DAU. Artinya, angka kemiskinan tidak menurun signifikan ketika terjadi penurunan/peningkatan DAU di Kota Tangerang. Selain itu, kontribusi DAU terhadap pengurangan angka kemiskinan hanya 6,2% dan selebihnya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

Menurut teori, kemiskinan sangat elastis terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan bias diukur melalui ukuran yang disebut dengan Indeks Gini. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan bagi studi-studi selanjutnya untuk memasukkan Indeks Gini ke dalam model, sehingga diperoleh nilai dugaan yang lebih pas dan memadai.

Terkait dengan hasil studi ini, Pemerintah Kota Tangerang tampaknya belum sepenuhnya efektif menggunakan DAU sebagai instrumen pengurangan angka kemiskinan. Aliran DAU seyogyanya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti infrastruktur,

pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih serius agar percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar dapat terpenuhi.

Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar menjadi penting, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 disebutkan, permasalahan bidang pendidikan di Indonesia antara lain mencakup: fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi yang belum tersedia secara merata; serta ketersediaan pendidik yang belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sen dalam Todaro (2003) menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Sebab, pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap pengetahuan, wawasan dan teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu, pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital.

Perlu disadari, kebijakan desentralisasi memerlukan prasyarat, yaitu transparan dan akuntabel dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pembangunan ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya, *good governance*, sulit bagi pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan yang ada. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Tangerang harus lebih meningkatkan nilai-nilai *good governance* dalam menjalankan organisasi pemerintahannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa butir kesimpulan, antara lain:

1. Pada beberapa aspek, kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan trend yang semakin baik. Hal tersebut terlihat pada beberapa indikator kinerja keuangan daerah.
2. Keempat indikator di atas dirangkum menjadi satu indeks, yaitu indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKKPD). Indeks kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Rata-rata indeks kinerja sebelum otonomi mencapai 1,17% sementara selama pelaksanaan otonomi hanya mencapai 0,67%. Hasil perhitungan ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan perekonomian di Kota Tangerang.

Penelitian ini menimbulkan implikasi penting, diantaranya:

1. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah Kota Tangerang juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor - sektor yang produktif di Kota Tangerang.
2. Pemerintah Kota Tangerang hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif terutama disektor PAD. Penggalan sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk

meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

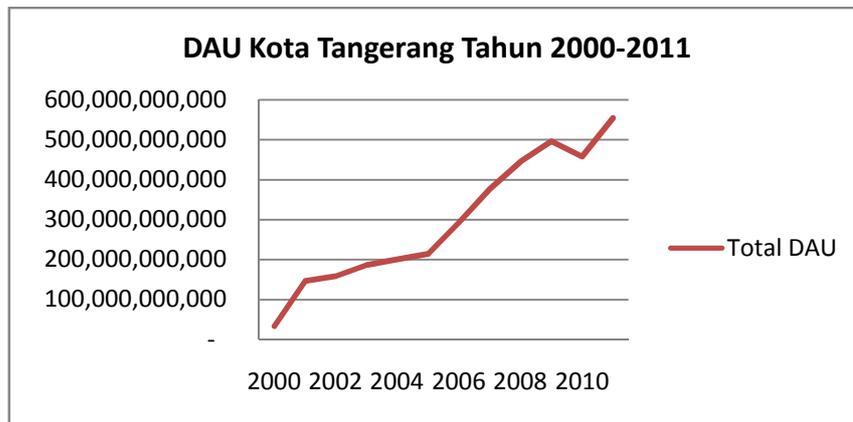
- Amir, A., 2007, *Perekonomian Indonesia (Dalam Perspektif Makro)*, Penerbit Biografika, Bogor
- Juanda, B., 2007, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, IPB Press, Bogor
- , 2009, *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*, IPB Press, Bogor
- Pakasi, C., 2005, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*, Disertasi, Program Studi Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Rozi, M.F., 2007, *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pengurangan Kemiskinan: Kasus Provinsi Riau*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Sidik, 2002, *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Sugiyono, 2002, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Todaro, M.P., 2003, *Pembangunan Ekonomi du Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta

Situs Internet:

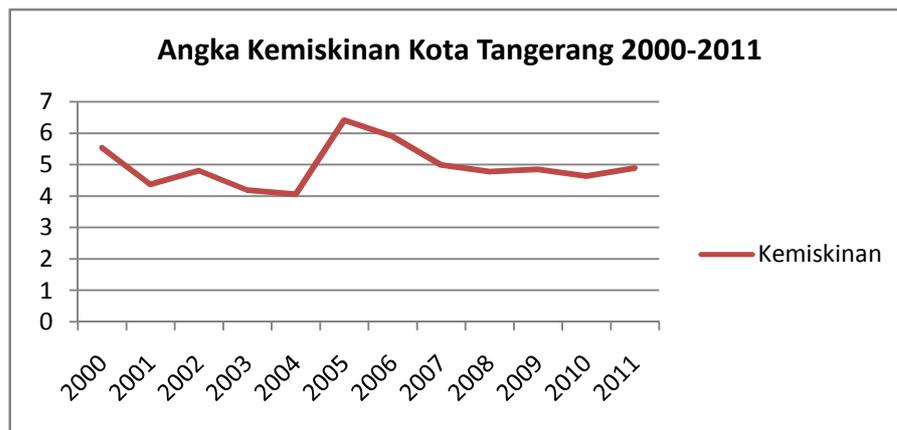
www.undp.or.id

www.bps.go.id

www.kotatangerang.go.id



Gambar 1. DAU Kota Tangerang 2000-2011



Gambar 2. Angka Kemiskinan Kota Tangerang 2000-2011